

	News Title : Agar Aman Berinvestasi, Bappebti Perketat Pengawasan Aset Kripto	
	Media Name : Validnews.id	Journalist : Khairul Kahfi
	Publish Date : 14 February 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti), Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Beranda > Ekonomi > Berita

> EKONOMI

14 Februari 2022 10:05 WIB

Agar Aman Berinvestasi, Bappebti Perketat Pengawasan Aset Kripto

Sehingga, pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Penulis: Khairul Kahfi

Editor: Dian Kusumo Hapenari



Ilustrasi uang kripto. Shutterstock/ikid

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag memperketat pengawasan perdagangan aset kripto. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum, agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan.

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan, setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

"Aset kripto baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bappebti melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah terdaftar untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan," tegas Wisnu dalam keterangan yang diterima, Jakarta, Minggu (13/2).

Lebih jauh, sambungnya, penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode yang sama juga telah diketahui memiliki beberapa kriteria penilaian.

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan syarat Aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sehingga, pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. "Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis aset kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut," ujar Wisnu.

Terkait dengan aset kripto Indonesia buatan anak bangsa, pada prinsipnya Wisnu menilai sebagai hal positif. Asalkan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga aset kripto buatan dalam negeri dapat diperdagangkan.

Bappebti melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah. Apalagi, potensi dan inovasi yang dimiliki anak bangsa, serta potensi pasar di Indonesia sangat besar dan terus bertumbuh.

Sebagai gambaran, dalam beberapa tahun ini, beberapa aset kripto buatan anak bangsa sudah dipasarkan di beberapa pasar global, dan ada yang sudah terdaftar dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020.

Sekali lagi, Wisnu mengimbau masyarakat memahami terlebih dahulu mekanisme dan risiko sebelum memutuskan berinvestasi aset kripto. Selain itu, masyarakat juga harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti.

"(Sehingga) dipastikan bisa diperdagangkan pada calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti," pungkas Wisnu.

Perlu Penguatan Pengawasan

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti jumlah pengguna cryptocurrency yang meningkat pesat di awal 2022. Berdasarkan data Kemendag, pengguna kripto mencapai 11,2 juta orang pada Januari 2022.

"Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan investor pasar modal yang masih berada di kisaran 7 juta investor. Dilihat dari segi nilai transaksi, cryptocurrency juga menunjukkan perkembangan yang tak kalah signifikan hingga mencapai angka Rp856 triliun," ungkap Anis, Kamis (10/2).

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengkhawatirkan pengawasan pemerintah sekarang belum mampu mengimbangi pesatnya perkembangan cryptocurrency, sehingga memicu ketidakstabilan di pasar keuangan Indonesia.

Menurutnya, peran lembaga pengawasan yang ada saat ini perlu diperkuat. Sebagaimana diketahui saat ini, yang melakukan fungsi pengawasan di pasar kripto saat ini adalah Bappebti.

"Bappebti dibutuhkan untuk melakukan fungsi pengawasan lebih ketat karena jumlah investor dan transaksinya sudah besar. Hal ini untuk mengantisipasi dan memitigasi moral hazard, kecurangan, penipuan, dan sebagainya," sambungnya.

Anis juga menghimbau ada informasi berimbang terkait kripto, sehingga masyarakat tidak saja mengetahui tentang keuntungan menggunakan kripto, tetapi juga mengetahui risikonya.

Di Indonesia, Bank Indonesia menyatakan, kepemilikan kripto sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab. Apalagi, tak sedikit negara-negara di Asia juga melarang penggunaan mata uang kripto.

Menilik lebih jauh, Anis juga memaparkan data proporsi pengguna cryptocurrency yang didominasi oleh generasi milenial. Saat ini, mayoritas investor kripto berusia 18-35 tahun, mencapai 66% dari keseluruhan jumlah investor.

Dirinya mengapresiasi antusiasme generasi milenial untuk berpartisipasi aktif di sektor keuangan. Akan tetapi, ia menganjurkan untuk tidak serta-merta terjebak dalam euforia kripto yang menjanjikan persentase profit yang dalam setiap transaksinya.

Sebagai gantinya, Anis mengimbau generasi milenial memilih opsi lain dengan berkontribusi pada sektor riil yang sudah jelas dapat menggerakkan roda perekonomian negara.